

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN PANDEGLANG

Cantika Dwi Maharani Ningtias*

Email: 21011010041@student.upnjatim.ac.id

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Marseto

Email: marseto15@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Anisa Fitria Utami

Email: anisa.fitira.ep@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2025-09-09

Revised: 2025-10-08

Accepted: 2025-11-16

Kata Kunci:

Jumlah_Penduduk;

Tingkat_Pendidikan;

Upah_Minimum_Kabupaten;

Pengangguran

Keywords:

Population; Education

Level; County Minimum

Wage; Unemployment

ABSTRAK

Di Indonesia, tantangan pengangguran masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan keterbatasan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang. Ketidaksiharian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja formal. Sebagian besar tenaga kerja akhirnya hanya mampu terserap di sektor informal, yang cenderung tidak stabil dan berproduktivitas rendah. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan data sekunder time series tahun 2010–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel independennya adalah jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten. Nilai R^2 sebesar 0,943 menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan 94,3% variasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya, peningkatan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum cenderung mendorong kenaikan pengangguran terbuka karena tekanan pasar tenaga kerja semakin besar, keterampilan tenaga kerja tidak selalu sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta kenaikan upah minimum dapat menekan perekrutan tenaga kerja baru.

ABSTRACT

In Indonesia, unemployment remains a serious problem, especially in areas with high population growth and limited job opportunities. This study aims to analyze the effect of population size, education level, and district minimum wage on the open unemployment rate in Pandeglang District. The mismatch

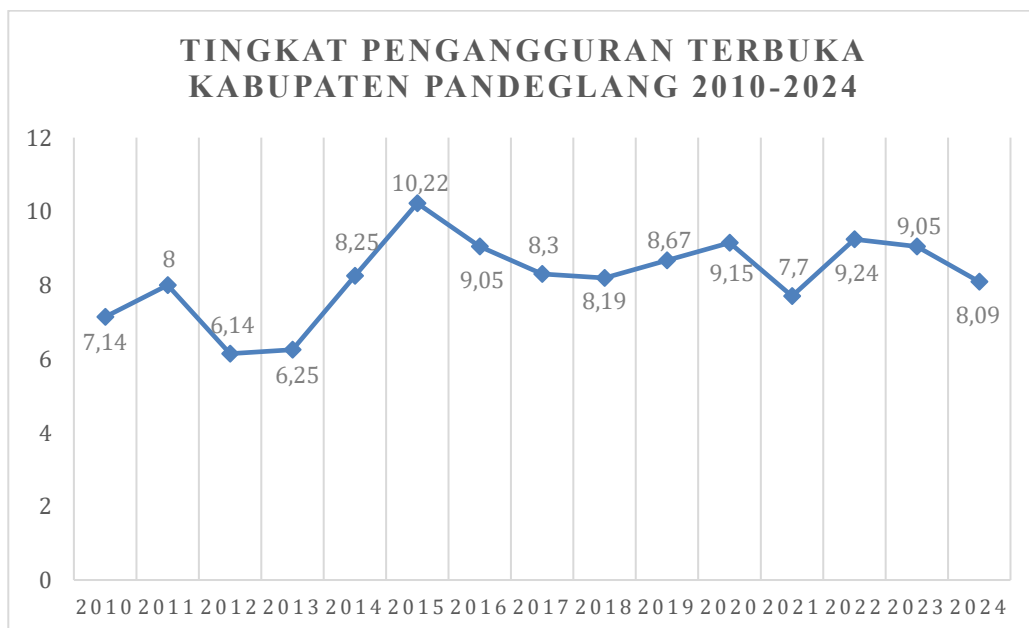
*Corresponding Author

Cantika Dwi Maharani Ningtias, dkk

between job seekers' skills and industry needs has resulted in low formal employment rates. Most workers end up being absorbed only in the informal sector, which tends to be unstable and low in productivity. Another influencing factor is the District Minimum Wage (UMK) policy. The method used is a quantitative method with multiple linear regression analysis using secondary time series data from 2010 to 2024 obtained from the Pandeglang District Statistics Agency. The dependent variable in this study is the open unemployment rate, while the independent variables are population size, education level, and the county minimum wage. The R^2 value of 0.943 indicates that the regression model is able to explain 94.3% of the variation in the open unemployment rate in Pandeglang County. The analysis shows that the population size, education level, and minimum wage of a district have a positive and significant effect on the open unemployment rate. This means that an increase in population size, education level, and minimum wage tends to drive up open unemployment because labor market pressures increase, labor skills do not always match job requirements, and an increase in the minimum wage can discourage the recruitment of new workers.

PENDAHULUAN

Pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator kritis dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan perekonomian menyerap tenaga kerja, tetapi juga berpotensi memicu dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti penurunan daya beli, peningkatan kemiskinan, dan ketimpangan sosial (Sukirno, 2016). Di Indonesia, tantangan pengangguran masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan keterbatasan lapangan kerja, seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2024 (Persen)

Pada awal tahun 2010, TPT tercatat sebesar 7,14 persen dan meningkat menjadi 8 persen pada tahun 2011. Namun, peningkatan ini tidak berlanjut secara konsisten, karena pada tahun 2012 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 6,14 persen, diikuti oleh kenaikan tipis menjadi 6,25 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014, TPT mengalami lonjakan kembali ke angka 8,25 persen, menandai awal dari tren peningkatan tajam yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, n.d.) .

Pada tahun 2015, TPT tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 10,22 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 8,3 persen dan 8,19 persen. Namun, angka ini kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 8,67 persen dan 9,15 persen. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika TPT mencapai titik terendah selama satu dekade terakhir, yakni 7,7 persen. Meskipun begitu, pada dua tahun berikutnya, yakni tahun 2022 dan 2023, angka pengangguran kembali meningkat menjadi 9,24 persen dan 9,05 persen. Terakhir, pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan menjadi 8,09 persen (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pola naik-turun ini menunjukkan bahwa pengangguran di Kabupaten Pandeglang tidak mengalami tren penurunan yang stabil, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan ketenagakerjaan yang belum konsisten. Kenaikan TPT pasca-pandemi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penciptaan lapangan kerja, kesesuaian keterampilan tenaga kerja, serta daya serap sektor usaha terhadap penduduk usia produktif.

Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi pengangguran di Kabupaten Pandeglang adalah jumlah penduduk. Selama kurun waktu 2015–2024, jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.228.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 1.325.950 jiwa, menjadikannya angka tertinggi selama periode tersebut. Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan ini tentunya juga berdampak pada peningkatan angkatan kerja. Setiap penambahan penduduk usia produktif yang tidak diiringi dengan perluasan lapangan kerja akan meningkatkan risiko pengangguran terbuka. Dengan kata lain, semakin besar jumlah penduduk namun lapangan kerja stagnan, maka semakin tinggi potensi pengangguran di suatu wilayah (Junaidi, 2019).

Selain faktor demografi, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pandeglang juga masih menjadi kendala utama. Indikator seperti rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah ini belum optimal (Todaro, M. P., & Smith,

2015:118). Ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja formal. Sebagian besar tenaga kerja akhirnya hanya mampu terserap di sektor informal, yang cenderung tidak stabil dan berproduktivitas rendah. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin penghasilan yang layak bagi pekerja.

Teori Dualisme Ekonomi Lewis (1954) memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis fenomena ini. Menurut Lewis, perekonomian di negara berkembang terdiri atas dua sektor: tradisional (padat tenaga kerja) dan modern (padat modal). Pengangguran terjadi ketika sektor modern tidak mampu menyerap surplus tenaga kerja dari sektor tradisional, yang sering diperparah oleh ketidaksesuaian keterampilan dan kebijakan upah yang kurang adaptif. Teori ini menjadi landasan konseptual untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum berinteraksi dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Misalnya, Junaidi (2019) menyoroti dampak pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran, sementara Todaro & Smith (2015) menekankan pentingnya kualitas pendidikan dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja. Di sisi lain, Samuelson & Nordhaus (2010) mengingatkan bahwa kebijakan upah minimum dapat memiliki efek ganda yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM.

Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual dan empiris yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut secara simultan dalam konteks Kabupaten Pandeglang sebuah wilayah dengan karakteristik demografis yang dinamis namun masih menghadapi ketidakstabilan tingkat pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pandeglang selama periode 2010–2024, tanpa tren penurunan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang belum tertangani secara komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang? Hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi TPT, dengan arah

pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan mekanisme pasar tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang secara empiris. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ketenagakerjaan serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik demografis dan ekonomi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu (*time series*) selama periode 15 tahun (2010–2024) yang diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sekunder yang mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan (rata-rata lama sekolah dalam tahun) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Data diperoleh dari publikasi resmi BPS Kabupaten Pandeglang dan instansi pemerintah terkait. Penggunaan data sekunder dipilih karena ketersediaannya yang lengkap, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2011).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengumpulkan data dari laporan tahunan BPS, publikasi pemerintah daerah, serta sumber akademis yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi konsistensi dan kelengkapannya sebelum dianalisis. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (jumlah penduduk, tingkat pendidikan, upah minimum) terhadap variabel dependen (TPT). Model regresi yang digunakan adalah:

$$TPT = \beta_0 + \beta_1 JP + \beta_2 TP + \beta_3 UMK + e$$

Keterangan:

- TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
JP : Jumlah Penduduk
TP : Tingkat Pendidikan
UMK : Upah Minimum Kabupaten
B0 : Konstanta (nilai Y apabila X1, X2, X3= 0)

B : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

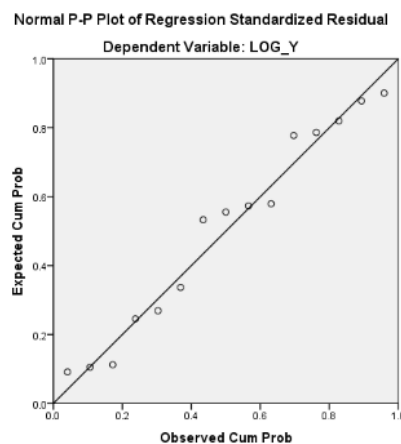
e : Error

Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Gujarati, 2012) yang meliputi Uji Normalitas: Menggunakan Normal P-P Plot untuk memastikan residual berdistribusi normal; Uji Autokorelasi: Menggunakan Durbin-Watson Test untuk mendeteksi korelasi antar residual; Uji Multikolinearitas: Dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0,10; Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan *scatter plot residual vs fitted value* untuk memastikan varians residual konstan. Uji statistik dilakukan dengan melakukan Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen, serta uji T untuk melihat hubungan variabel dependen terhadap variabel independen secara parsial dan uji F untuk melihat hubungan variabel dependen terhadap variabel independen secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Normal Probability-Probability (P-P) Plot of Regression Standardized Residual*, terlihat bahwa titik-titik (data residual) cenderung mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Tidak terdapat penyimpangan yang signifikan antara distribusi kumulatif yang diobservasi dengan distribusi kumulatif yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
JP	4.660	10	Tidak terjadi multikolinearitas
TP	4.896	10	Tidak terjadi multikolinearitas
UMK	1.529	10	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dianalisis melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi dapat diinterpretasikan secara tepat karena tidak mengalami gangguan akibat adanya hubungan linier yang tinggi antar variabel independen.

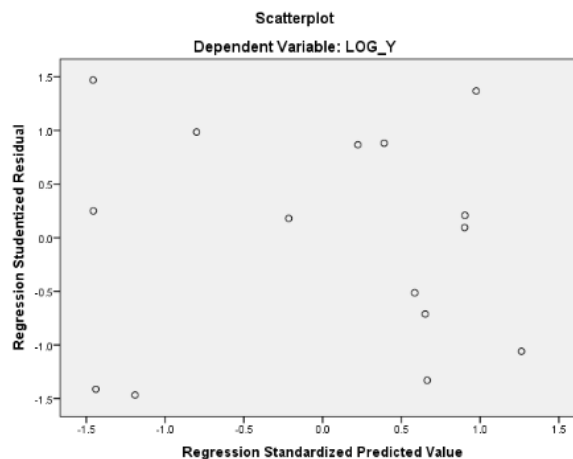
Uji Autokorelasi

Hasil yang diperoleh menunjukkan regresi nilai DW sebanyak 1,291. Kemudian nilai N adalah 10, jumlah variabel bebas adalah 3, lalu tingkat signifikansi 5%, maka berdasarkan tabel dari Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah (dL) = 0,525 serta batas atas (dU) = 2,016. Jadi, nilai $4 - dU = 4 - 2,016 = 1,984$ dan nilai $4 - dL = 4 - 0,525 = 3,475$.

$$dL < DW < Du = 0,525 < \mathbf{1,939} < 2,016$$

Dikarenakan nilai pada DW (1,939) yakni posisinya di antara dL (0,525) serta dU (2,016), maka dari itu dapat diasumsikan yakni model diperkirakan tidak terdapat autokorelasi antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang divisualisasikan melalui *scatterplot* antara nilai *Regression Standardized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu

horizontal (nilai residual = 0) serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas, baik pola menyempit maupun melebar. Pola penyebaran yang acak ini mengindikasikan bahwa varians residual pada model regresi bersifat konstan atau terjadi kondisi homoskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model, sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi parameter yang efisien dan dapat diandalkan.

Uji Hipotesis

Analisis dengan Metode Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Tak Standar (B)	Standar Error	Koefisien Standar (Beta)	Nilai t	Sig. (p-value)
Konstanta	4,178	2,470	-	1,692	0,119
JP	0,933	0,466	0,425	2,001	0,041
TP	-1,272	0,525	-0,550	-2,423	0,034
UMK	0,216	0,023	0,843	9,448	0,000
Statistik		Nilai			
R Square (R ²)	0,943				
Adjusted R ²	0,927				
F hitung	60,273				
Signifikansi F	0,000				
Durbin-Watson	1,939				
Jumlah Sampel (N)	15				

Dalam bentuk matematis, persamaan hasil analisis regresi linier berganda yakni:

$$TPT = 4.178 + 0.933JP - 1.272TP + 0.216UMK$$

Persamaan tersebut menjelaskan hubungan antara X serta Y. Penjelasan mengenai besar koefisien pada regresi setiap variabel tercantum pada tabel yakni dibawah ini:

1. Konstanta (Intercept) = 4,178

Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu jumlah penduduk (JP), tingkat partisipasi angkatan kerja (TP), dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) berada pada kondisi konstan atau nol, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 4,178 persen. Konstanta ini menjadi nilai dasar TPT sebelum mempertimbangkan pengaruh dari variabel-variabel bebas.

2. Koefisien JP = 0,933

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 jiwa akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,933 jiwa, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah

penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat mendorong peningkatan angka pengangguran.

3. Koefisien TP = -1,272

Koefisien negatif pada variabel ini berarti bahwa setiap kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,272%, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi partisipasi angkatan kerja, semakin besar kemungkinan terserapnya tenaga kerja dalam pasar kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

4. Koefisien UMK = 0,216

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,216%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hubungan positif ini dapat dijelaskan melalui teori ekonomi tenaga kerja, di mana kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban biaya tenaga kerja bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan tenaga kerja dan memicu pengangguran.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel. 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pola	R	R <i>Lapangan</i>	<i>Kotak R yang Disesuaikan</i>	<i>Std. Kesalahan Perkiraan</i>
1	.971a	.943	.927	.01279

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,943 menunjukkan bahwa sebesar 94,3% variasi atau perubahan pada variabel dependen, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu jumlah penduduk (JP), tingkat partisipasi angkatan kerja (TP), dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dengan kata lain, model regresi ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sementara itu, sisanya sebesar 5,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, migrasi penduduk, kebijakan pemerintah, perkembangan sektor industri, dan faktor ekonomi makro lainnya yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Analisis Statistik Hipotesis melalui Uji F

Tabel 4. Hasil Pengujian Uji F

Pola	Jumlah Kotak	Df	Berarti Lapangan	F	Sig.
1 Regresi	.030	3	.010	60.273	.000b
Sisa	.002	11	.000		
Seluruh	.031	14			

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai F hitung sebesar 60,273 dengan nilai signifikansi (Sig. F) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata penelitian ($\alpha=0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk (JP), tingkat partisipasi angkatan kerja (TP), dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam analisis, karena seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki kemampuan yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Analisis Statistik Hipotesis melalui Uji T

Tabel 5. Hasil Pengujian Uji T

Variabel	Nilai Statistik t	Signifikan t
JP	2,001	0,041
TP	-2,423	0,034
UMK	9,448	0,000

1. Hasil Uji Pengaruh Jumlah Penduduk (X1) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Nilai t hitung sebesar 2,001 dengan nilai signifikansi 0,041 ($<0,05$) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Koefisien positif mengindikasikan bahwa penambahan jumlah penduduk akan cenderung meningkatkan tingkat pengangguran terbuka apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru.

2. Hasil Uji Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Nilai t hitung sebesar -2,423 dengan nilai signifikansi 0,034 ($<0,05$) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

3. Hasil Uji Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Nilai t hitung sebesar 9,448 dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Koefisien positif menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan angka pengangguran terbuka, kemungkinan karena peningkatan biaya tenaga kerja yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk (X1) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk cenderung diikuti oleh meningkatnya angka pengangguran terbuka. Secara konseptual, kondisi ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja, sementara pertumbuhan lapangan kerja tidak selalu dapat mengimbangi laju pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja, kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dapat berisiko memperburuk keadaan kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkelola cenderung meningkatkan tekanan pada sumber daya yang terbatas, seperti pangan, air, dan lahan (Dewi, 2023).

Temuan ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Penduduk yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population* (1798). Menurut Malthus, jumlah penduduk cenderung bertambah mengikuti deret ukur (geometrik), sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan dan sumber daya lainnya hanya mengikuti deret hitung (aritmetik). Ketidakseimbangan ini, menurut Malthus, akan menimbulkan tekanan terhadap keberlangsungan hidup manusia, yang dapat memicu kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran (Malthus, 1798 dalam Junaidi & Hardiani, 2019:30-39). Dalam konteks ketenagakerjaan, ketika jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan, akan terjadi surplus tenaga kerja yang berujung pada meningkatnya pengangguran terbuka.

Selain sesuai dengan teori, hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfida et al. (2023), yang menemukan bahwa variabel jumlah

penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, khususnya di daerah dengan keterbatasan kesempatan kerja, akan memperbesar potensi pengangguran karena tidak semua penduduk usia kerja dapat terserap ke dalam pasar kerja.

Berdasarkan temuan ini, implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah perlunya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan perluasan kesempatan kerja. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pengembangan sektor padat karya, peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis, serta program pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan penduduk dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan yang produktif, bukan menjadi beban yang meningkatkan angka pengangguran terbuka.

Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Pandeglang berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang. Arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk, maka semakin rendah tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah. Hal ini dapat dijelaskan oleh peran Pendidikan Pandeglang sebagai sarana peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, sehingga individu yang berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya.

Pendidikan berperan penting dalam menentukan bidang pekerjaan seseorang. Penelitian sebelumnya oleh Pitaloka (2023: 5-6) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk bekerja di sektor formal dibandingkan sektor informal. Pendidikan yang lebih tinggi membuka lebih banyak peluang kerja karena meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu, sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja dan memiliki akses yang lebih luas ke berbagai industri serta posisi yang lebih baik (Zacky Sholihah, 2023). Kualitas pendidikan tenaga kerja juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia; tingkat pendidikan yang ditempuh dapat mempengaruhi produktivitas kerja, karena pendidikan berfungsi sebagai modal utama untuk meningkatkan hasil kerja secara maksimal (Larassanti Defina Rizka Faza Moh. Khusaini, 2024). Selain itu, Pitaloka (2023) menekankan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan peluang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas

dan akses pendidikan menjadi langkah strategis dalam memperbaiki struktur ketenagakerjaan di Indonesia.

Fenomena ini sejalan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikembangkan oleh Gary S. Becker dalam karyanya *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (1964). Teori ini memandang manusia bukan sekadar tenaga kerja, tetapi juga sebagai bentuk modal (capital) yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi pada pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengalaman kerja (Becker, 1993:20-30). Becker menjelaskan bahwa individu yang memiliki pendidikan formal yang memadai, keterampilan teknis, dan pengalaman kerja yang relevan akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Peningkatan produktivitas tersebut berkontribusi pada peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan penurunan risiko pengangguran. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi baik bagi individu maupun masyarakat.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfida et al. (2023), yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan individu untuk terserap di pasar kerja, karena mereka memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan membatasi peluang kerja dan meningkatkan risiko pengangguran, terutama di sektor formal yang menuntut keterampilan khusus.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pemerintah memperluas akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, khususnya pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri. Selain itu, sinergi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat secara optimal berkontribusi dalam menekan angka pengangguran terbuka.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (X3) Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten (UMK) Pandeglang berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang. Arah hubungan positif ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMK Pandeglang cenderung diikuti dengan meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang. Kondisi ini

dapat terjadi ketika penetapan UMK Pandeglang melebihi tingkat ekuilibrium pasar tenaga kerja, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan.

Pemerintah Indonesia meningkatkan upah minimum regional setiap tahun, yang memberikan manfaat bagi pekerja dengan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Suhadi, et al. 2022). Menurut Teori Neoklasik, kenaikan upah akan mendorong peningkatan penawaran tenaga kerja. Namun, di sisi lain, permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun seiring dengan meningkatnya tingkat upah (Ghinastri Syafitri, 2024).

Fenomena ini sesuai dengan teori upah minimum dalam perspektif mikroekonomi klasik, yang merupakan bagian dari teori permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Dalam kerangka teori ini, tingkat upah ditentukan oleh titik keseimbangan (ekuilibrium) antara permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja dari rumah tangga. Apabila pemerintah menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dari tingkat ekuilibrium, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat, sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan akan menurun. Akibatnya, terjadi surplus tenaga kerja yang tidak terserap di pasar, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran terbuka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari & Nilasari (2025) yang menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kenaikan UMK, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dapat memicu perusahaan mengurangi jumlah pekerja, menunda perekrutan, atau bahkan menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi yang lebih efisien. Kondisi ini khususnya dirasakan oleh sektor usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas produksi.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya penetapan UMK yang memperhatikan kondisi ekonomi daerah, kemampuan pelaku usaha, dan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan UMK hendaknya diiringi dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja, sehingga beban tambahan yang ditanggung perusahaan sebanding dengan nilai tambah yang dihasilkan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan upah minimum dapat tetap meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menimbulkan lonjakan pengangguran terbuka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pandeglang. Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka akan terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pandeglang. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja.
3. Upah Minimum Kabupaten berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pandeglang. Kenaikan UMK yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan pelaku usaha dapat menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap, sehingga mendorong peningkatan angka pengangguran terbuka.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan penyuluhan kependudukan, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya dan sektor ekonomi kreatif. Hal ini penting agar peningkatan jumlah penduduk tidak menjadi beban pasar tenaga kerja.
2. Terkait pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, diperlukan peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal maupun nonformal yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan keterampilan (vocational training) dan sertifikasi profesi juga perlu digalakkan untuk meningkatkan daya saing

angkatan kerja, terutama bagi lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Pandeglang.

3. Terkait pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, penetapan UMK hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Pemerintah daerah bersama pelaku industri perlu mencari solusi kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga kenaikan UMK sejalan dengan nilai tambah yang dihasilkan, tanpa mengurangi penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. *Journal Of Development Economic and Social Studies* 2 (2), 314-316.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam angka 2024*. 42(1), 1–71.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (n.d.). *Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam angka 2015*.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education. Winner of the nobel price in economics*.
- Dewi, I. R. (2023). Mengupas Kemiskinan di Provinsi Banten: Bagaimanakah Peran Faktor Kependudukan dan Ekonomi? *Ecoplan*, 6 (2), 100 –117.
- Elfida, C., Maimun, & Amilia, N. (2023). Pengaruh Jumlah Pertumbuhan Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh. *Jibes: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 72–84.
- Ghinastri, & Syafitri. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UmK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.21776/jdessa.2024.03.1.6>
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5)*.
- Hardianti, Herman, & Syarifuddin. (2023). Pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Kabupaten Mamuju. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 326–331.
- Henny Mawarta Siregar, J. S. (2023). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara Melalui Pendekatan Error Correction Model*. 1(10), 532–542.
- Johar, M. R. (2023). Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka: Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Oikos : Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 108–117. <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i1.6035>
- Junaidi, & H. (2019). *Ekonomi kependudukan*. Rajawali Pers.
- Junaidi, & Hardiani. (2019). *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan*.

- Larassanti Defina Rizka Faza & Moh. Khusaini. (2024). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan Dan Usia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1154–1165. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.14>
- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 483–493. <https://doi.org/10.36985/ywmawh84>
- Lewis, W. . (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. In *The Manchester School* (Vol. 22, Nomor 2). The Manchester School.
- Mankiw, G. N. (2018). *Principles Of Economics* (J. Sabatino (ed.); 8 ed.). South-Western Cengage Learning.
- Pitaloka, S., Juniati, T., Yunanda, T., & Hajar, I. (2023). Pengaruh capaian pendidikan terhadap pilihan sektor pekerjaan. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.47134/aaem.v1i1.3>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (New York). McGraw-Hill Education.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian KJuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suhadi, et al. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10, 879–888.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Nomor Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hal. 211–212).
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori pengantar* (3 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12 ed.). Pearson Addison Wesley.
- Zacky, M., & Sholihah, R. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesempatan Berkarir (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Batang). 2(1).